

Media Online	Regional.kompas.com
Tanggal	20 Januari 2025
Wilayah	Provinsi Jawa Tengah



Dinsos Jateng Alokasikan Rp 212,4 M untuk Penurunan Kemiskinan, Apa Programnya?

<https://regional.kompas.com/read/2025/01/20/124446978/dinsos-jateng-alokasikan-rp-2124-m-untuk-penurunan-kemiskinan-apa>

SEMARANG, KOMPAS.com - Dinas Sosial (Dinsos) Jawa Tengah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 212,4 miliar untuk mendukung penurunan angka kemiskinan di provinsi tersebut.

Hingga Januari 2025, tercatat masih ada 3,7 juta warga yang tergolong miskin, yang dibagi dalam tiga kategori:

1. Miskin ekstrem (prioritas 1)
2. Sangat miskin (prioritas 2), dan
3. Miskin (prioritas 3).

Kepala Dinsos Jateng, Imam Maskur, menjelaskan bahwa dana tersebut akan digunakan dalam tiga program prioritas Dinsos.

Program-program itu mencakup bantuan untuk anak-anak dan penghuni panti sosial, buruh pabrik, petani tembakau, serta warga miskin yang terdaftar sebagai penerima Kartu Jateng Sejahtera (KJS).

"Bantuan masyarakat dari Dinsos enggak mengalami penurunan. Dari tiga program total Rp 212,4 miliar," ungkap Maskur saat dikonfirmasi, Senin (20/1/2025).

Program Dinsos untuk tekan angka kemiskinan

Maskur merinci ketiga program tersebut, yaitu KJS dengan 12.764 penerima manfaat, Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) dengan 92.000 penerima manfaat, serta 6.410 penerima di 56 panti sosial milik Pemprov Jateng.

"DPHCHT yang asalnya 85.000 sekarang ditambah 7.000 orang. BLT itu untuk buruh rokok, petani tembakau, sekarang ditambah buruh tani cengkih. Jadi BLT malah nambah. Jadi buruh pabrik yang enggak dapat bantuan dari kabupaten kota, diberi dari provinsi," jelasnya.

Lebih lanjut, buruh tani tembakau yang menerima alokasi bantuan dari kabupaten/kota juga akan mendapatkan bantuan dari Pemprov Jateng, termasuk petani cengkih.

"Satu orangnya per tahun menerima Rp 1,2 juta yang diberikan dua kali, sekali pemberian Rp 600.000, sekitar April dan September. Lalu KJS Rp 370.000 per bulan," tambahnya.

Dengan demikian, sepanjang 2025, Dinsos mengalokasikan bantuan program KJS sebesar Rp 56,7 miliar, DPHCHT sejumlah Rp 109,7 miliar, dan panti sosial Rp 46 miliar.

Menurut Maskur, upaya ini merupakan kewajiban negara untuk memenuhi hak warganya, terutama bagi mereka yang membutuhkan sokongan ekonomi.

Data Terpadu (DT) Jateng mencatat, terdapat 3.737.218 warga miskin, yang terdiri dari 439 warga miskin ekstrem, 166.346 warga sangat miskin, dan 3.570.433 warga miskin.